

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip – prinsip manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten, dan berkelanjutan. Pada dasarnya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan pengeluaran, tetapi manajemen belanja daerah perlu mendapat perhatian lebih besar dibandingkan manajemen pendapatan, sebab mengeluarkan uang jauh lebih mudah dibandingkan memperolehnya. Dalam kondisi tertentu, seringkali menghemat anggaran lebih sulit dibandingkan mengejar target pendapatan, (Mahmudi, 2009 : 78).

Disamping itu, pada umumnya korupsi lebih banyak terjadi pada aspek pengeluaran, seperti pada belanja pengadaan barang dan jasa dan belanja modal. Karena sifat pengeluaran yang mudah dilakukan dan rawan korupsi tersebut, maka untuk mengurangi pemborosan anggaran, penyelewengan dan korupsi anggaran, pemerintah daerah perlu membuat manajemen belanja daerah. Hal ini penting karena manajemen belanja tidak sekedar terkait masalah teknis bagaimana menghemat pengeluaran tetapi juga terkait dengan strategi dan kebijakan bagaimana mengalokasikan anggaran secara efisien, efektif, adil, dan merata, (Mahmudi, 2009 : 78).

Mahmudi (2009 : 86) menyatakan bahwa perencanaan dan pengendalian belanja merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah,

sebab belanja yang tidak terencana dan terkendali dengan baik akan menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan uang Negara yang sangat merugikan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan belanja Negara yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah dapat mengelola belanja secara baik yaitu memenuhi prinsip *value for money* (penghargaan atas setiap rupiah uang Negara), maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja. Dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran Negara menjadi lebih mudah dilakukan.

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) adalah “proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi”. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Basis - basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut. Kusufi (2012 : 154) menyatakan bahwa basis/dasar akuntansi antara lain adalah *cash basis* (basis kas), *accrual basis* (basis akrual), *modified cash basis* (basis kas modifikasian) dan *modified accrual basis* (basis akrual modifikasian).

Sejak berlakunya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Berbasis Akrual, entitas pemerintahan dituntut untuk menyusun dua macam laporan keuangan, yaitu Laporan Finansial dan Laporan Pelaksanaan Anggaran. Kedua laporan keuangan tersebut menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda dan tidak saling terkait. Laporan Finansial disusun dengan menggunakan basis akrual dan Laporan Pelaksanaan Anggaran disusun dengan menggunakan basis kas. Salah

satu laporan keuangan yang termasuk dalam Laporan Finansial adalah Laporan Operasional (LO) dan yang termasuk Laporan Pelaksanaan Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sama halnya pada akuntansi pendapatan, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sama - sama memiliki komponen yang mirip, yaitu beban dan belanja. Perbedaan keduanya adalah pada pengakuannya, beban diakui secara akrual sedangkan belanja diakui secara kas, (Kusufi, 2012 : 154).

Hal ini juga terjadi pada Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan, yang bergerak dalam bidang Pekerjaan Umum pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan, gorong – gorong, pengairan, dan lain – lain dimana pada dinas tersebut rutinitas belanja sering terjadi, terutama mengenai belanja langsung, yang berkaitan dengan kebutuhan aktivitas masyarakat sehari – hari seperti jalan, jembatan dan lain – lain.

Mengingat kondisi banyaknya jalan, jembatan, dan gorong - gorong yang rusak di sekitar Kabupaten Bangkalan, maka Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan melakukan kerja sama dengan pihak pemborong untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan. Hal ini akan menyebabkan banyak terjadinya pengeluaran, terutama belanja langsung yang terkait dengan kebutuhan untuk perbaikan jalan, jembatan, maupun gorong – gorong yang rutinitas setiap tahun terjadi.

Oleh karena itu, penerapan konsep belanja yang baik perlu di utamakan, mengingat rentannya penyelewengan dana atau penyalahgunaan dana yang telah disediakan oleh pemerintah untuk pemborong, dalam pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan, gorong – gorong, dan lain – lain, hal ini sangat

membuka peluang tindakan korupsi bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Pengukuran dan Pengakuan Belanja Langsung Pada Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan di Kabupaten Bangkalan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengukuran belanja langsung pada Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana pengakuan belanja langsung pada Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengukuran belanja langsung pada Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengkaji pengakuan belanja langsung pada Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat bagi akademik

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya untuk referensi penelitiannya, serta menjadi acuan penelitian dan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin meneliti topik yang sama namun dengan masalah dan lokasi yang berbeda di lingkungan Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Trunojoyo Madura yang merupakan persyaratan dalam Tugas Akhir (TA).

b. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan, memperoleh masukan mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh instansi yang berhubungan dengan pengukuran dan pengakuan belanja langsung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas P.U Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan yang beralamatkan di Jl. Pemuda Kaffa No. 10, Bangkalan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yang di mulai dari tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014.